

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH
(NONPERFORMING LOAN) SERTA KESESUAIANNYA
DENGAN PSAK NO. 31 PADA PT. BRI MAKASSAR**

EKA SETIANI MUSLIMAH

105730374112



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH
(NONPERFORMING LOAN) SERTA KESESUAIANNYA
DENGAN PSAK NO. 31 PADA PT. BRI MAKASSAR**

EKA SETIANI MUSLIMAH

105730374112

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)
Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No 31 Pada Bank Rakyat
Indonesia, Tbk. Cab. Makassar

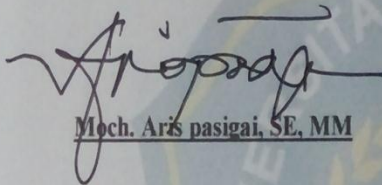
Nama : EKA SETIANI MUSLIMAH

Nim : 105 730 374 112

Jurusan : Akuntansi

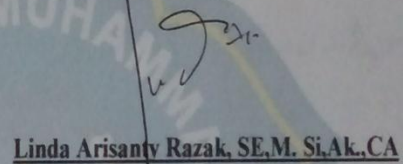
Makassar, September 2016

Pembimbing I



Moch. Aris pasigai, SE, MM

Pembimbing II



Linda Arisanty Razak, SE, M. Si, Ak., CA

Diketahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. H. Mahmud Sugung, MA
KTAM 793079

Ketua Prodi Akuntansi



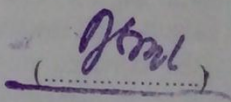
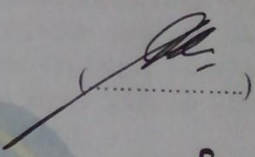
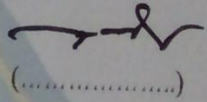
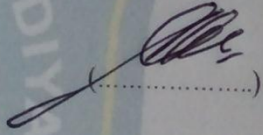
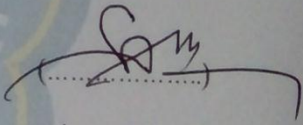
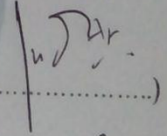
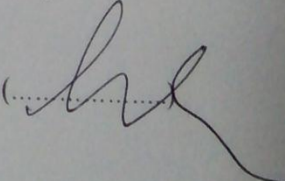
Ismail Badollahi, SE, M. Si, Ak., AC
NBM: 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama EKA SETIANI MUSLIMAH, Nim 10573 03741 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1438 H/ 2016 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari sabtu 10 September 2016 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2016

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(PD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA 
2. Abd. Salam HB, SE, M.Si, Ak. CA 
3. Linda Arisanty Razak, SE, M.Si, Ak. CA 
4. Drs. H. Hamzah Limpo, MS 

ABSTRAK

Eka Setiani Muslimah. 2016. “ Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) serta Kesesuaiannya dengan PSAK no 31 Pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar.” Di bimbing oleh Moch. Aris Pasigai dan Linda Arisanty Razak.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif dimana membandingkan perlakuan akuntansi yang digunakan Bank Rakyat Indonesia dengan PSAK no 31 terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah *nonperforming loan* kesesuaiannya dengan PSAK no 31. Maka diperoleh bahwa Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk kredit bermasalah (*Nonperforming loan*) telah sesuai dengan PSAK dimana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, namun disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian ataupun *inflasi* tetap dapat diperhitungkan.

Perlakuan akuntansi dalam hal Penyisihan kerugian penurunan nilai yang telah dilakukan Bank Rakyat Indonesia baik dalam aktivitass pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan terhadap pendapatan dari kredit bermasalah telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK No.55 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Kata Kunci : *Nonperforming loan*, PSAK no 31

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir jaman.

Pada saat menyusun skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta Almarhum Bakka Dg tobo dan ST. Sayana Dg. Kebo, Serta kepada Ketiga sodara ku tersayang Ahmad Gunawan M. Ahmad Dharmawan M, Ahmad Setiawan M yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dukungan, Materi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Serta terima kasih kepada sodara dan sodari serta iparku yang telah mendukung ku dan mendorong semangatku dalam studi
3. Bapak Dr. H. Rahman Rahim SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Ismail Badollahi, SE,M. Si,Ak., AC selaku Ketua Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis dan Sekaligus sebagai Penasehat Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Moch. Aris pasigai, SE, MM dan Ibu Linda Arisanty Razak, SE,M. Si,Ak.,CA selaku dosen pembimbing skripsi, yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staf Bank Rakyat Indonesia yang telah membantu dan memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
8. Para Dosen dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan akuntansi 2012 Unismuh, khususnya buat kelas Ak 5-12 yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.
10. Sahabat-sahabat ku Irma, Ina, Leha, Uni , Ida, Haeruddin, Irman, Sidin yang selama ini telah mendukung ku dan memberikan ku motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Dan kepada Kakanda Muh.Muhtar yang selalu menyertaiku dalam doa, harapan dan selalu ada waktu buat ku dalam mendengarkan keluh kesahku pada saat menyusun skripsi
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak sempat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran.

Akhirnya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bernilai disisi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamiin.....!

Makassar, Juni 2016

Eka Setiani Muslimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akuntansi.....	6
B. Asumsi Dasar Akuntansi.....	7
C. Konsep Pengakuan dan pengukuran Unsur Laporan keuangan menurut SAK.9	
D. Definisi Bank	12
E. Akuntansi Pendapatan	13
F. Kredit.....	15
G. Pengertian dan Ruang Lingkup Risiko Kredit.....	20
H. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah.....	23
I. Penyelamatan Kredit Macet	25
J. Kerangka fikir	27
K. Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
B. Metode Pengumpulan Data.....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Metode Analisis	31
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan Bank Rakyat Indonesia.....	32
B. Visi dan Misi Perusahaan Bank Rakyat Indonesia	35
C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar	36
D. Uraian Tugas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Nonperforming Loan</i>	57
B. Perlakuan Akuntansi <i>Nonperforming Loan</i> Kesesuaiannya Dengan PSAK Pada Bank Rakyat Indonesia	75
BAB 6 PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Fikir	27
Gambar 2 : Struktur Organisasi PT. BRI, Tbk. Cab. Makassar	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pinjaman Yang Diberikan Berdasarkan Segmen	60
Tabel 2 : Perkembangan <i>Non Performing Loan</i>	62
Tabel 3 : Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit. 64	
Tabel 4 : Perbandingan Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>) Berdasarkan PSAK 31 dan PAPI	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana Industri Perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dapat dikatakan sebagai urat nadi dari sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu fungsi utama bank yaitu sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan oleh bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor pengkreditan, atau penyaluran dana sehingga pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor pengkreditannya.

Semakin tinggi volume pengkreditannya maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba/*profit*. Oleh karena itu tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk mencapai *profitabilitas* yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara profesional terutama dalam sektor pengkreditan. Pengelolaan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan *likuiditas* dan *profitabilitas* bank, karena tingkat *likuiditas* dan *profitabilitas* yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditetapkan dan penyaluran kredit kepada masyarakat biasanya mengalami hambatan dalam hal mengembalian pinjaman kepada pihak bank dan nyaris semua bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit yang bermasalah, kredit bermasalah atau kredit macet memberi dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat dan perbankan Indonesia. Kemudian bahaya yang timbulkan atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan Bank sebagian maupun seluruhnya.

Aminullah, Jagatsyah. 2007. Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Sesuai PSAK No. 31 Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di *Unit Regional Credit Recovery Makassar*. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk untuk kredit bermasalah (*nonperforming loan*) lebih mengacu ke PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) dimana pengukuran kredit tersebut menggunakan *current cost*, Perlakuan akuntansi pendapatan bunga untuk kredit kategori bermasalah pada Bank Mandiri diakui secara *cash basis*, bunga diakui pada saat bunga tersebut diterima sedangkan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya.

Andi Jayanti. 2012. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standard (IFRS)* telah berlaku pada perbankan Indonesia sejak 1 Januari 2010 hal tersebut mengakibatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 31 revisi 2000 efektif dicabut pada tanggal itu juga karena tidak sesuai dengan IFRS. Dengan dicabutnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31, maka laporan keuangan perbankan Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 revisi 2006 “ Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Sebelum PSAK No. 31 dicabut, perlakuan akuntansi nonperforming loan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Semakin besar kredit macet yang dihadapi maka menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya *profitabilitas* yang diharapkan, hal ini mempengaruhi kepercayaan para nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah maka semakin besar pula jumlah cadangan yang harus disediakan serta semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri.

Salah satu ruang lingkup kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, kebijaksanaan perkreditan BRI senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu kebijakan pemerintah pada hakekatnya ditunjukkan untuk meningkatkan produktifitas produsen daerah. Untuk tujuan pengkreditan tersebut Bank Rakyat Indonesia telah ikut serta secara aktif dalam

menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan Industri Perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri sehingga dibuat suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan, yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 mengenai akuntansi perbankan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang perbankan kredit yang *Performing* diakui secara aktual. Sedangkan kredit yang *Nonperforming* diakui secara kas, artinya bank tidak boleh mengakui secara pendapatan sebelum menerima pembayaran tunai dari debitur.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan diatas, maka penulis memilih judul “ Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* Serta Kesesuaiannya dengan (PSAK) No. 31 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi masalah pokok adalah : “ Apakah Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk terhadap Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 31?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui apakah Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk terhadap Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 31

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memberi gambaran perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah/*nonperforming loan* dan kesesuaiannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.31.
- b. sebagai salah satu bahan pertimbangan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah/*nonperforming loan* serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.
- c. Bagi penulis sebagai pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah /*nonperforming loan* sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Pada sektor usaha istilah akuntansi sudah seringkali kita dengar dan bahkan hampir setiap bidang usaha melakukan yang namanya pencatatan akuntansi. Oleh karena itu komite *american institute of certified publik accounting (AICPA)* dikutip dari Sofyan Safri Harahap, (2008 : 4) Akuntansi sebagai berikut; akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter. Transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Definisi diatas bisa dipermasalahkan seandainya kita diperhadapkan dengan keadaan sistem pencatatan yang sudah menggunakan komputerisasi, apalagi proses pengolahan datanya tidak lagi melalui *optic, scanning* dan sebagainya. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting theory (ASOBAT)* yang dikutip dari Sofyan Syafri Harahap (2004 : 4) Akuntansi diartikan sebagai berikut : “ Proses mengidenifikasikan, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”

Accounting Principle Board statement no. 4 dikutip dari Sofyan Syahri Harahap (2008 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa fungsinya adalah Memberikan informasi kuantitatif. Umumnya dalam ukuran uang, mengenal suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur, sebagai alat informasi umumnya dalam ukuran uang atau informasi kuantitatif menjadi alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

B. Asumsi Dasar Akuntansi

Laporan keuangan juga merupakan alat pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Asumsi dasar dari laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi :

1. Dasar akrual

Laporan keuangan menyajikan semua transaksi yang terjadi sesuai peristiwanya, hak dan kewajiban yang melekat didalamnya bukan hanya melihat transaksi yang melibatkan kas.

2. Dasar kelangsungan usaha

Laporan keuangan dianggap menggambarkan perusahaan suatu entitas yang memang dimasa depan tidak akan melakukan likuiditas baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (2008 : 126) diungkapkan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai serta terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :

1. Dapat dipahami, artinya kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya yang dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan, agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan kalau dapat memenuhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu.
3. Materialitas, relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang tanpa, mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan.
4. Keandalan, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar yang dapat disajikan.

C. Konsep Pengakuan Dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan.

1. Pengakuan unsur laporan keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, (2007 : 5) pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca ataupun laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya kedalam neraca atau laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui kalau :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Ikatan Akuntansi Indonesia menguraikan proses pengakuan dengan PSAK (2008 : 09) yaitu :

1. Pengakuan asset

Asset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan asset tersebut mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Pengakuan penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan labarugi jika penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan kenaikan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

4. Pengakuan beban

Beban diakui dalam laporan labarugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

2. Pengukuran unsur Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan mengemukakan definisi pengukuran sebagai berikut :Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan labarugi.

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Biaya historis

Asset dicatat dalam pengeluaran kas (atau setarakas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu (misalnya pajak penghasilan). Dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

b. Biaya kini

Asset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara asset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.

c. Nilai realisasi

Asset dinilai dalam kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas tidak didiskontokan yang diharapkan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam usaha normal.

d. Nilai sekarang

Asset yang dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih

dimasa depan yang didiskontokan kenilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah *historical cost*.

D. Definisi Bank

Berdasarkan pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Istilah Bank resmi oleh, Kasmir S.E. M.M, (2008 : 25) definisi bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah sebagai berikut :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian Bank menurut PSAK No. 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2000 :31) adalah:

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran, falsafat yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan

masyarakat. Hal tersebut tampak dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito berjangka serta memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lukman Dendrawijaya (2005 : 14) mendefinisikan Bank (bank umum) adalah :

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan pembayaran alat-alat sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

E. Akuntansi Pendapatan

Ramly faud & Rustam DM (2005 : 281) mengemukakan pendapatan dari kegiatan bank dapat diklasifikasikan dari kegiatan operasional bank dan non operasional bank. Pendapatan Bank biasanya dicatat secara akrual, kecuali pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima pendapatan utama dari transaksi Bank antara lain :

1. Pendapatan Bunga
2. Pendapatan Komisi
3. Pendapatan Jasa Lain

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, (2007 : 23) mendefinisikan pendapat sebagai berikut : “ pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”

Financial Accounting standard (FASB) dikutip dalam Sofyan Syafri Harahap (2014 : 226) mendefinisikan pendapatan:

Arus kas masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan yang sedang berjalan.

Soemarso (2004 : 54) mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah dibedakan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu asset dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa dijual.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pendapatan merupakan hasil dari suatu perusahaan yang diperoleh selama jangka waktu tertentu.

F. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata Kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kepercayaan. Dengan perkataan lain kredit mengandung pengertian adanya seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu dipermasalahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak yang lain yang memawajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*”

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pemberian surat berharga yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*”

2. Pengakuan dan pengukuran kredit

Ikatan akuntansi dalam pernyataan standar akuntansi keuangan no. 31 (2007 : 12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok

kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan.

Pada saat menandatangani perjanjian kredit dengan debitur bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar *flafond* kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit atau kredit kelolaan. Kredit diakui sebesar pokok kredit atau debet.

3. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu fasilitas kredit (Kasmir, 2006 : 98) :

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap masalah permohonan kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan sipenerima kredit kesepakatan ini diluangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati jangka waktu tersebut bisa jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Risiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Jenis-jenis Kredit Usaha Perbankan

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek sangat bervariasi (Kasmir, 2008 : 103) membagi menjadi :

1. Dilihat dari segi kegunaan.

a. Kredit investasi yaitu Kredit yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

b. Kredit modal kerja biasa digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produksi yaitu Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif yaitu Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan yaitu Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

b. Kredit jangka menengah adalah jangka waktu kreditnya berkisaran antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang dimana pengembaliannya panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha perkebunan dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, berikan kepada para profesional dosen, doctor atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

G. Pengertian Dan Ruang Lingkup Risiko Kredit.

1. Pengertian risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diderita bank terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo risiko kredit adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga). Penyebab dari risiko kredit adalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang berpengaruh terhadap kredit macet atau *nonperforming loan (NPL)*. Mahmud Ali (2006 : 23)

2. Ruang lingkup risiko kredit

Pada perencanaan kredit hendaknya memperhatikan risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Hal tersebut biasa terjadi dalam bisnis perbankan dimana hampir mustahil bahwa semua kredit disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan

menghadapi kredit bermasalah *nonperforming loan (NPL)*. *Nonperforming loan* tersebut disebabkan oleh adanya risiko kredit yang dikelompokkan oleh Rahmat Fidaus & May a Ariyanti (2004 : 35) antara lain sebagai berikut:

a. Risiko usaha

Berbagai jenis usaha masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi biasanya mengandung risiko yang tinggi pula begitu pun sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah maka risikonya pun akan rendah.

b. Risiko geografis

Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat berkaitan dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri, yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau dekat muara sungai yang sering banjir, akan sangat beresiko karena bencana.

c. Risiko keramaian dan keamanan

Situasi kemanan yang buruk akan sangat mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk jelas dapat berdampak negatif pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.

d. Risiko politik

Banyak terjadi kegagalan kredit disebabkan gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan / ketentuan-ketentuan pemerintah serta tidak stabilnya politik.

e. Risiko ketidakpastian

Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antar pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat.

f. Risiko inflasi

Secara umum inflasi dapat didefinisikan bahwa naiknya harga barang-barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) lebih banyak dari jumlah atau barang yang tersedia (jumlah penawaran).

g. Risiko persaingan

Bank benar-benar harus selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur atau pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan perusahaan sejenis.

3. Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kredit bermasalah *nonperforming loan* yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu / tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada pihak seperti yang telah di perjanjikan dan menjadi salah satu prioritas yang sangat diperhatikan oleh pihak perbankan. Karena pengaruh yang ditimbulkan apabila terjadi peningkatan kredit bermasalah adalah terganggunya kegiatan operasional perbankan sehingga perolehan pendapatan akan berkurang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK) no.31 kredit *nonperforming loan* pada umumnya merupakan kredit yang pembayarannya angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Kredit *nonperforming loan* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar digunakan, macet. Jadi dapat disimpulkan kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan peraturan bank Indonesia 7/2/PB/2005 tentang penilaian-penilaian kualitas bank umum dipaparkan : peminjam dianggap wanprestasi yaitu:

- a. Terjadinya tunggakan pokok atau bunga dan tagihan lainnya selama 90 hari.
- b. Tidak diterimanya pembayaran pokok atau bunga dan tagihan lainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo.
- c. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Rumus perhitungan NPL : $(\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$

H. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah

1. Pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah

Berdasarkan PSAK No.31 bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan sebagai berikut :Pendapatan bunga untuk asset produktif yang digolongkan *performing* diakui secara akrual.

1. Pendapatan bunga untuk asset produktif yang digolongkan *nonperforming loan* tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan sejak asset tersebut dinyatakan *nonperforming* dan hanya diakui apabila pendapatan tersebut telah diterima secara tunai.

2. Pada saat asset produktif digolongkan.
3. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan.
4. Pembatalan dilakukan dengan membuat jurnal balik sebesar bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih, dan pembatalan tersebut akan mengurangi pendapatan bunga yang telah diakui.
5. Bunga dari asset produktif nonperforming yang tidak diakui sejak asset produktif dinyatakan *nonperforming* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai komitmen dan kontijensi.
6. Seluruh penerimaan dari kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurangan pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pendapatan bunga untuk asset produktif digolongkan *performing* secara akrual.
8. Pendapatan bunga untuk asset produktif yang digolongkan *nonperforming* tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan sejak asset tersebut dinyatakan *nonperforming* dan hanya diakui apabila pendapatan tersebut telah diterima secara tunai.
9. Pada saat asset produktif digolongkan *nonperforming*
 - a. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan.
 - b. Pembatalan dilakukan dengan membuat jurnal balik sebesar bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih, dan pembatalan tersebut akan mengurangi pendapatan bunga yang telah diakui.

10. Bunga dari asset produktif *nonperforming* yang tidak diakui sejak asset produktif dinyatakan *nonperforming* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kombinasi dan kontijensi.
11. Seluruh penerimaan dari kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Keseluruhan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

2. Penyajian kredit

Kredit disajikan dineraca sebesar pokok kredit. Pendapatan bunga dalam penyelesaian merupakan perhitungan bunga dari asset produktif yang *nonperforming* yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan.

I. Penyelamatan Kredit Macet

Adanya risiko yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas maka pihak bank perlu melakukan langkah-langkah penyelamatan apabila terjadi kredit bermasalah (*Nonperforming loan*) Menurut Kasmir, (2008 : 127) penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Memperpanjang hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dengan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- a. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

a. Dengan menambah jumlah kredit.

b. Dengan menambah equity :

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

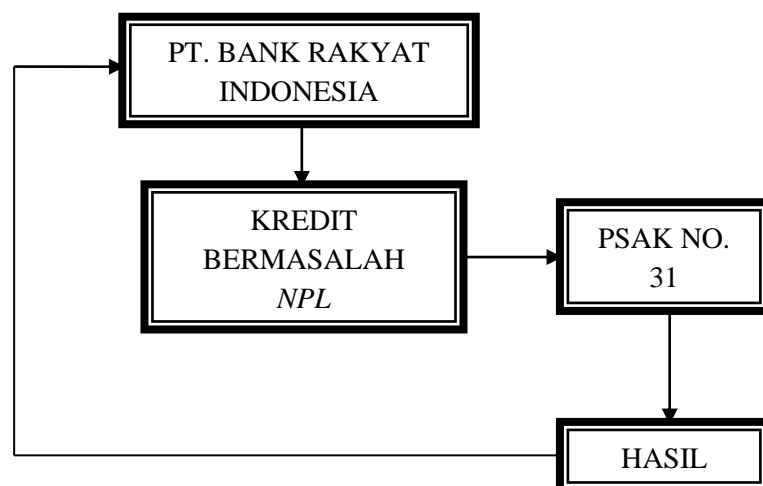
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ke tiga jenis yang ada di atas.

5. Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

J. Kerangka Pikir

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarannya dalam suatu kerangka pikir seperti gambar berikut ini :



Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian

K. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka hipotesis saya dalam penelitian ini diduga bahwa “ Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming loan*) pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Dalam kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang perbankan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian adalah : Kantor Cabang Makassar PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Jln. Ahmad Yani. Waktu yang digunakan untuk mengadakan penelitian selama dua bulan yaitu pada bulan April sampai Mei 2016.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Metode kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Bank Rakyat Indonesia khususnya divisi kredit dan divisi akuntansi.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam proposal ini merupakan data kualitatif yang terdiri dari non angka yang sifatnya deskriptif.

Metode penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data kualitatif yang digunakan adalah :

- a. Buku pedoman perusahaan yang berisi pelaksanaan perlakuan akuntansi dan pelaksanaan proses pemberian kredit pada tempat penelitian.
- b. peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Bank yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian

b. Data Sekunder

Data ini merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

D. Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah metode yang menjelaskan dan melaksanakan perbandingan data dari dua hasil penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda. Dimana akan dipaparkan metode perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah (*nonperforming loan*) yang diharapkan oleh Bank Rakyat Indonesia dan membandingkan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia .

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengalami beberapa perubahan yaitu:

- a) Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

No.AHU- 48353.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan perubahannya.

- b) Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.51 tanggal 26 Mei 2008.
- c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 13 Februari 2009.
- d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan focus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar. Atas keberhasilannya sebagai bank pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam jumlah yang besar, kinerja BRI mendapat pujian dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada *AFI Global Policy Forum* di Bali 27 September 2010.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka berdasarkan data pada laporan keuangan konsolidasi PT. BRI Tbk. periode

30 Juni 2010, Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 6.433 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 18 Kantor Wilayah, 14 Kantor Inspeksi/SPI, 404 Kantor Cabang (dalam negeri), 1.195 Kantor Cabang Pembantu, 4.548 BRI Unit, 250 Teras BRI, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 *New York Agency*, 1 *Cayman Island Agency*, 1 Kantor Perwakilan Hongkong.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia.

1. Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi

- a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.
- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat penting dalam suatu manajemen dan harus selalu ada dalam satu kegiatan suatu perusahaan, termasuk dalam usaha perbankan dimana dapat memberikan gambaran kedudukan setiap personil sehingga memudahkan karyawan untuk mengetahui batasan, wewenang dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing.

Hasil kesepakatan struktur organisasi dan uraian proses kinerja perusahaan dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh organisasi di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan, dan kesatuan gerak langkah operasional. Menurut Mulyadi (2001:183), struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah, agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat. Bentuk organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Makassar adalah *fungsiional* dan staff, jenjang *karier* para anggota organisasi tidak terikat pada tingkat pangkat dan jabatan struktural yang diperuntukkan bagi mereka yang memimpin satuan-satuan kerja yang melakukan kegiatan penunjang dimana pengendalian oleh pimpinan tidak terlalu ketat namun tidak mengabaikan fungsi pengawasan.

Struktur digambarkan dengan suatu bagan organisasi. Dari struktur organisasi akan terlihat jelas alur kerja dan prosedur serta tugas dan fungsi yang ada dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar.

D. Uraian Tugas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar

Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Selaku pimpinan tertinggi di kantor cabang, pimpinan cabang mengkoordinir seluruh kegiatan agar terarah dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai wakil direktur kantor pusat untuk aktivitas bisnis PT. BRI (Persero), Tbk di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya prinsip-prinsip dan prosedur bisnis kerja.

2. Pejabat Internal Control (PIC) Merupakan pejabat yang bertugas mengontrol pekerjaan karyawan PT. BRI (Persero), Tbk setiap harinya.

3. Manajer Pemasaran

Merupakan pejabat yang berada setingkat di bawah pimpinan cabang, bertugas untuk merencanakan, mengorganisir dan mengelola serta melaksanakan pemberian kredit kepada setiap nasabah.

4. AO (*Account Officer*) *Commercial*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pengkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kantor cabang.
- c. Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
- d. Sebagai anggota Tim Penyelamat dan penyelesaian kredit bermasalah di kantor cabang dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit.

5. AO (*Account Officer*) *Consumer*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat RPT Kredit Pegawai Tetap (Kretap) atau Kredit Pensiunan (Kresun) dan bertanggung jawab atas tercapainya dalam mencapai RKA yang telah dicapai.
- b. Melakukan analisis terhadap debitur potensial secara kolektif untuk mengukur tingkat resiko kredit secara intensional guna menciptakan portofolio kredit yang menguntungkan.
- c. Melakukan penagihan angsuran debitur, khususnya pada saat pembayaran gaji pada instansi/perusahaan untuk mengelola kepastian pembayaran.

- d. Meneliti kebenaran dokumen yang dipersyaratkan pada Kretap/Kresun, sesuai keaslian surat keputusan, daftar gaji, dan lain-lain untuk mengurangi resiko kredit.
- e. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa kredit.

6. *AO (Account Officer) Program*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat program akuntansi yang baik yang akan dioperasikan oleh pegawai PT. BRI (Persero), Tbk.
- b. Mengontrol program akuntansi yang telah ada.
- c. Menjaga kebaikan dan kelayakan program akuntansi yang digunakan.

7. *Funding Officer*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan dan rencana kerja bulanan.
- b. Membuat rencana kunjungan mingguan.
- c. Melaksanakan aktifitas penjualan kepada nasabah potensial.
- d. Melakukan kegiatan pemasaran produk dan jasa dengan cros selling.

8. *Manajer Operasional*

Merupakan pejabat yang berada setingkat di bawah pimpinan cabang, bertugas untuk mengelola semua kegiatan operasional PT. BRI (Persero), Tbk.

9. *AMPB (Asisten Manajer Penunjang Bisnis)*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu manajer bisnis dalam pembuatan RKA PT. BRI (Persero), Tbk unit sewilayah kerjanya untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan serta menetapkan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai bangsa pasar mikro.
- b. Ikut bertanggung jawab atas pengembangan bisnis PT. BRI (Persero), Tbk unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba yang maksimal dan mengevaluasi/memonitor bisnis PT. BRI (Persero), Tbk unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning PT. BRI (Persero), Tbk unit dibandingkan bank pesaing.
- c. Membantu dalam pembinaan nasabah dan PT. BRI (Persero), Tbk unit (kunjungan ke nasabah, pembrantasan tunggakan, pemasukan daftar hitam, penyelamatan kredit melalui 3R (restructuring, reconditioning, rescheduling) memotivasi dan memberikan petunjuk teknis kepada kepala unit dan mantara dalam meningkatkan atau memperbaiki keragaan unitnya dan lain-lain).

10. Supervisor Administrasi Kredit (Supervisor ADK)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di kantor cabang.
- b. Memastikan bahwa ketaatan terhadap KUP PT. BRI (Persero), Tbk dan PPK untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat/opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan KUP dan PPK serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.

- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Putusan Kredit Ritel (PTK) terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
- d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang.
- e. Mengadministrasikan PDWK pejabat kredit lini di kantor cabang.
- f. Melakukan pembatasan pencairan kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan PTK.
- g. Menerima bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- h. Mempunyai kewenangan menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi.

11. ADK Commercial

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran, Kriteria Resiko Yang Dapat diterima (KRD), dan KND guna menjamin pinjaman yang sehat, menghasilkan dan menguntungkan.
- b. Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan ADK atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat kredit ini.
- c. Menyiapkan perjanjian kredit di bawah tangan guna mengamankan kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.

- d. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit yang akan dicairkan dalam rangka kelancaran pelayanan nasabah dan menjaga kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.
- e. Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembuatan perjanjian kredit notariil dalam rangka mengamankan kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.

12. ADK Consumer

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan daftar penagihan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kredit guna menjamin pendapatan kantor cabang.
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit yang telah dicairkan dalam rangka kelancaran pelayanan nasabah dan menjaga kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.
- c. Memelihara dan mengerjakan berkas satu pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.
- d. Menyiapkan perjanjian kredit guna mengamankan kepentingan PT. BRI (Persero), Tbk.

13. Supervisor Pelayanan Intern

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pelayanan untern di kantor cabang dan pengelolaan dan kebutuhan logistik kantor cabang PT. BRI (Persero), Tbk Unit.
 - b. Menjamin semua surat yang masuk dan keluar diproses dengan cepat dan tepat waktu.
 - c. Menjamin penyediaan kebutuhan operasional di kantor cabang PT. BRI (Persero), Tbk Unit.
 - d. Menangani harta dan asset, disposisi dan penyimpanan arsip kepegawaian PT. BRI (Persero), Tbk dengan kebijakan dari PT. BRI (Persero), Tbk Pusat.
 - e. Menjamin dan memelihara kas kecil (*petty cash*).
 - f. Membuat permohonan pengambilan kas dari brankas pada pagi hari dan selama hari berjalan.
 - g. Menyiapkan kelebihan kas selama hari berjalan dan mengumpulkan penerimaan kas selama akhir hari.
 - h. Memberikan persetujuan surat-surat penolakan pada nasabah.
 - i. Memeriksa bahwa seluruh kas teller telah dihitung pada akhir hari.
 - j. Secara efektif memonitor pelayanan terhadap nasabah.
14. Sekertariat SDM

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Mengatur lalu lintas komunikasi (telepon, faksimili, internet) dalam rangka menjaga efektivitas komunikasi kantor cabang.
- c. Mendistribusikan surat yang masuk kepada pejabat yang bawenang.
- d. Mengatur agenda kerja pimpinan cabang (pinca) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pinca.
- e. Mengatur pembagian kerja supir, pramubakti, satpam secara efektif dan mengadministrasikan semua bentuk hukuman jabatan bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

15. *Logistik*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan logistik kepada pekerja sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelayanan kantor cabang.
- b. Mengadministrasikan semua aktiva tetap kantor cabang dengan tertib dan benar untuk mengamankan arsip bank serta melakukan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terbitnya administrasi pembukuan.
- c. Menyiapkan laporan di bidang logistik sesuai permintaan kantor wilayah guna informasi bagi manajemen.

16. *Lapangan, Arsip, IT dan Maintenance*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan laporan yang diperlukan baik oleh intern maupun ekstern PT. BRI (Persero), Tbk.

- b. Mengirimkan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara tepat waktu untuk memberikan informasi bagi manajemen.
- c. Memelihara dan mengerjakan back up dana guna mengamankan kepentingan Bank.
- d. Menjaga kebersihan dan suhu ruangan hardware, serta keamanan ruang hardware dalam rangka menjaga asset bank.

17. *Asisten Manajer Operasional (AMO)*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan tidak terjadi transaksi(kecuali ATM) dalam kurun setelah close system.
- b. Melaksanakan tambahan kas awal hari bagi teller dan ATM serta menerima setoran kas dari teller
- c. Melaksanakan flag operasional.
- d. Memeliharakerjakan register dan penyimpanan surat berharga serta kuitansi payment point.

18. *Supervisor* Pelayanan Kas

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kuitansi tambahan kas Supervisor dan ATM serta menerima uang dari *Operation Officer (OO)*.
- b. Menyetujui tambahan kas awal Teller/TKK (Tim Kurir Kas), membuku dan mendistribusikan uangnya kepada Teller/TKK.
- c. Memelihara kerjakan *Register Kas Supervisor*.
- d. Mengisi kas ATM bersama Petugas yang ditunjuk.

- e. Menerima kuitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari BRI Unit yang diterima di Kanca.

19. Teller

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat aplikasi tambahan kas awal dan menerima uang dari *Supervisor*.
- b. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya.
- c. Membayar uang kepada nasabah yang berhak.
- d. Meneliti kesahan bukti kas yang diterima.
- e. Mengesahkan dalam OLSIB dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai yang ada dalam batas wewenangnya.

20. Tim Kurir Kas (TKK)

Bertanggung jawab kepada AMO tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kas dan surat-surat atau nota-nota.

21. Kliring

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima dan meneliti kesahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah/UPN (Unit Pelayanan Nasabah).
- b. Membukukan tanda setoran kliring dan nota kredit/nota debit.
- c. Menerima dan membukukan warkat kliring penyerahan yang ditolak oleh Bank lain.

22. Payment Point

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima setoran uang.
- b. Memeriksa kebenaran dan kesahan bukti setoran dan dokumen pendukungnya.
- c. Melakukan penyetoran uang ke Teller atau Supervisor (dalam bertindak sebagai Teller).

23. *Costumer Service*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melayani aplikasi pembukaan rekening simpanan, giro dan meneliti persyaratan pembukaan rekening.
- b. Mengisi data statis nasabah pada PC.
- c. Melayani permintaan cek, bilyet giro dan salinan rekening Koran.
- d. Menerima keluhan dari nasabah dan menindak lanjuti atau meneruskan kepada pejabat yang berwenang.
- e. Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.
- f. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk dana dan jasa PT. BRI (Persero), Tbk.
- g. Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa PT. BRI (Persero), Tbk.
- h. Membuat overbooking.
- i. Membuat laporan-laporan nasabah inti kerjasama.

- j. Membuat laporan-laporan PBB.
- k. Melayani Bapertarum.
- l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

24. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk PT. BRI (Persero), Tbk serta memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjam bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- b. Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan dan memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan agar memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- c. Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa PT. BRI (Persero), Tbk guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

25. Administrasi Dana dan Jasa (Adm. DJS)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melayani aplikasi pembukuan rekening simpanan.
- b. Mengisi customer information file (CIF) pada sistem.
- c. Memeliharakerjakan arsip berkas nasabah.
- d. Menindaklanjuti laporan kehilangan Cepebri, bilyet wesel dll.
- e. Memeliharakerjakan register ONH dan membantu pengisian ONH.

26. Manajer Bisnis Mikro (MBM)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya untuk mendukung pencapaian target.
- b. Membuat rencana kerja anggaran (RKA) PT. BRI (Persero), Tbk Unit.
- c. Berperan serta secara aktif dalam strategi pengembangan bisnis dan pelayanan PT. BRI (Persero), Tbk Unit, serta menjalin hubungan secara professional dengan debitur dan pihak ketiga yang terkait.
- d. Memastikan bahwa pelayanan dan semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindaklanjuti.
- e. Memastikan semua laporan untuk kepentingan intern dan ekstern telah dibuat sesuai ketentuan.
- f. Melaporkan masalah-masalah perkreditan di PT. BRI (Persero), Tbk Unit kepada Pinca.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit PT. BRI (Persero), Tbk Unit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.
- h. Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa.

27. Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat RKA PT. BRI (Persero), Tbk unit sewilayah kerjanya untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan serta menetapkan strategi

bisnis berdasarkan analisis peasing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar bebas.

- b. Pengembangan bisnis PT. BRI (Persero), Tbk unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba yang meksimal dan mengevaluasi/memonitor bisnis PT. BRI (Persero), Tbk unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning PT. BRI (Persero), Tbk unit dibandingkan bank pesaing.
- c. Melakukan cross selling untuk mendukung sinergi bisnis PT. BRI (Persero), Tbk.
- d. Pembinaan nasabah dan PT. BRI (Persero), Tbk unit (kunjungan ke nasabah, pembrantasan tunggakan, pemasukkan daftar hitam, penyelamatan kredit melalui 3R (restructuring, reconditioning, rescheduling) memotivasi dan memberikan petunjuk kepada kepala unit dan mantra dalam meningkatkan atau memperbaiki keragaman unitnya dan lain-lain).
- e. Mengusulkan dan merekomendasi reward dan punishment dengan mengacu pada sistem penghargaan yang telah ditetapkan dan melaksanakan waskat bidang logostik wilayah kerjanya untuk mengeleminasi terjadinya penyimpangan.

28. Supervisor Administrasi Unit

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merupakan petugas yang berhubungan dengan administrasi di 8 unit dan kemudian melaporkan ke cabang.

- b. Melakukan pengecekan terhadap administrasi di unit.
- c. Mengontrol stabilitas administrasi di unit.

29. Petugas Administrasi Unit (PAU)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan untuk menjaga ketertiban keakuratan laporan yang akan digunakan manajemen.
- b. Membuat konsep surat berdasarkan perintah/disposisi Manajer Bisnis Mikro (MBM)/Pimpinan Cabang (Pinca).
- c. Mengagenda surat masuk dan surat keluar dari bank PT. BRI (Persero), Tbk unit.
- d. Menyiapkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) pegawai-pegawai di jajaran mikro wilayah kerjanya.
- e. Meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit yang akan diutus oleh MBM/Pinca/Asisten Manajer Bisnis Mikro.
- f. Mengalokasi biaya supervise keseluruhan PT. BRI (Persero), Tbk unit di wilayah kerjanya dalam rangka kewajaran biaya PT. BRI (Persero), Tbk unit.

30. Petugas Rekonsiliasi Unit (PRU)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola register nota hubungan kantor cabang dan PT. BRI (Persero), Tbk unit Non SIBS untuk menjaga ketertiban administrasi lalu lintas nota.

- b. Mengentry nota UD-1A dan UD-1B ke PC hubungan Kanca dan PT. BRI (Persero), Tbk.
- c. Mengarsipkan nota-nota hubungan kantor cabang dan PT. BRI (Persero), Tbk unit Non SIBS untuk ketertiban administrasi.
- d. Merekonsiliasi hubungan rekening kantor cabang PT. BRI (Persero), Tbk unit Non SIBS, rekening PT. BRI (Persero), Tbk unit Non SIBS-kantor cabang dalam rangka ketertiban hutang piutang likuidasi kantor cabang-unit.
- e. Mencocokkan point a di atas dengan saldo rekening hubungan kantor cabang PT. BRI (Persero), Tbk unit Non SIBS yang berdasarkan dari sistem pembukuan sentral.

31. Pegawai Cadangan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pegawai cadangan bertanggung jawab langsung kepada supervisor administrasi unit atau AMBM/MBM/Pinca apabila tidak ada supervisor PT. BRI (Persero), Tbk unit.
- b. Membackup pegawai PT. BRI (Persero), Tbk unit atau TKK yang berhalangan sesuai instruksi AMBM/MBM/Pinca dalam rangka kelancaran operasional PT. BRI (Persero), Tbk unit.
- c. Berfungsi sebagai PAU atau PRU pada saat tidak menggantikan petugas PT. BRI (Persero), Tbk unit.
- d. Melakukan tugas lain sesuai dengan intruksi atasannya.

32. Penilik

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan waskat sidur dan operasional PT. BRI (Persero), Tbk unit yang meliputi :
 - 1) Kas (maksimal kas, saldo kas fisik, keabsahan bukti pergeseran kas dan lain-lain).
 - 2) Kupedes (proses penyelesaian Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKKP), analisis kredit, Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPWT), restifusi bunga, perhitungan cadangan penghapusan dan lain-lain).
 - 3) Simpanan (pengambilan simpanan, mutasi ob, perhitungan bunga dan lain-lain).
 - 4) Jasa bank lainnya (nota-nota transfer dan kliring, bukti ob, dan lain-lain).
 - 5) Operasional/administrasi pembukuan (kerahasiaan password, verifikasi awal, register-register, penyimpanan bukti-bukti kas, saldo, rekening hutang piutang, rekening hubungan kantor cabang-unit lainnya).
 - 6) Sumber Daya Manusia (SDM) dan logistik.
 - 7) Laporan (MIR 01 s/d 06) serta laporan insidentil lainnya.
 - 8) Ketertiban pelaksanaan LPI (Laporan Pemeriksaan Individual), LPT (Laporan Pemeriksaan Tim), LTPT (Laporan Temuan Penting Triwulan) serta pengarsipannya.

- b. Monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut atas temuan pemilik sebelumnya dalam kanins oleh kepala unit dan AMBM.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik intern maupun ekstern.
 - d. Melaporkan hasil pemeriksaan atau temuan penting kepada MBM/Pimpinan Cabang dengan tindakan kantor wilayah dan memberikan petunjuk/solusi penyelesaian kepada kepala unit dan MO sehingga permasalahan dapat segera dilaksanakan.
33. PT. BRI (Persero), Tbk Unit
- Merupakan unit cabang pembantu dari PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Makassar.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Nonperforming Loan*

Nonperforming Loan (NPL) merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, *rentabilitas*, *risiko kredit*, *risiko pasar* dan *likuidasi*. Biasanya rasio *Nonperforming Loan* merupakan target jangka pendek perbankan. Semakin tinggi rasio *Nonperforming Loan* maka tingkat *likuiditas* bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga (DPK). Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor intern bank, faktor debitur dan faktor ekstern bank dan debitur.

- a. Faktor Intern Bank Faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Kegiatan ekspansi penyaluran kredit yang besar – besaran tanpa adanya standarisasi analisis calon *debitur* dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank, penetapan tingkat suku bunga kredit yang tinggi, jumlah penyaluran kredit yang melampaui batas kemampuan bank dalam likuidasi dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah merupakan beberapa faktor penyebab utama terjadinya kenaikan rasio *Non Performing loan*. Dari sisi faktor intern debitur terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing*

Loan perbankan yaitu karakter baik atau buruk debitur, kemunduran usaha debitur, dan faktor usia.

- b. *Non Performing Loan* yang disebabkan oleh *faktor ekstern non bank* dan debitur, yaitu adanya pengaruh inflasi dan kurs , pengaruh *GDP* per kapita riil , adanya bencana alam dan pengaruh tingkat PDB, penurunan kondisi moneter negara dan adanya peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional bank. Sedangkan faktor eksternal pada dasarnya dapat dimasukkan kedalam kondisi. Termasuk kedalam faktor eksternal ini adalah persaingan usaha, kondisi usaha dan faktor alam.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Nonperformin Loan*) adalah sebesar 5%. Rumus perhitungan *Nonperforming Loan* adalah sebagai berikut: Rasio *Nonperforming Loan* = (Total NPL / Total Kredit)x 100%. Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5% (50 / 1000 = 0.05).

1. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi *Nonperforming Loan* Suatu Perbankan :
 - a. Kemauan atau itikad baik debitur : Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.
 - b. Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia : Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *Nonperforming Loan* suatu perbankan,

misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang banyak menggunakan BBM dalam kegiatan produksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang untuk memenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya kepada bank. Demikian juga halnya dengan PBI, peraturan-peraturan Bank Indonesia mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap *Nonperforming Loan* suatu bank. Misalnya BI menaikkan BI Rate yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

c. Kondisi perekonomian : Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap *Nonperforming Loan* diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Inflasi* adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus.

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya berkurang.

b) Kurs rupiah mempunyai pengaruh juga terhadap *Nonperforming Loan* suatu bank karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional.

- c) Meningkatnya *Nonperforming Loan* ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank.
- d) Suku bunga memang merupakan salah satu sumber income bank yang mana jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank.

Tabel 1
Pinjaman yang diberikan berdasarkan segmen
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk
(dalam jutaan rupiah)

Segmen	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Total (Rp)	Growt(%) 2014 2015
Ritel	181.854.338	199.828.590	219.785.772	601.468.900	9,99
Mikro	142.266.742	164.054.180	188.428.179	494.749.101	14,86
Korporasi	110.195.386	131.214.518	156.266.587	397.676.491	19,09
Pembiayaan dan piutang syariah	14.028.390	15.599.553	16.614.006	46.241.949	6,5
Jumlah kredit	448.344.856	510.696.841	581.094.544	1.540.136.241	13,78
CKPN	-15.171.736	-15.886.145	-17.162.183	- 48.220.064	8,03
Jumlah kredit setelah dikurangi ckpn	433.173.120	494.810.696	563.932.361	1.491.916.150	14,21

Sumber :Hasil Olahan Penulis

Tabel diatas menunjukkan beberapa segmen pinjaman yang diberikan oleh BRI seperti Ritel, Mikro dan Korporasi. **Segmen Ritel** adalah eceran kredit yang pinjaman sudah ditentukan oleh bank secara sepihak. Misalnya : suku bunga, bentuk kredit, jangka waktu jaminan, syarat- syarat lain, dan tidak boleh ditawar-tawar, biasanya orientasi kredit ritel adalah kepada golongan mikro (kecil dan menengah) atau biasa disebut dengan UMKM. **Segmen Mikro** adalah pinjaman dalam jumlah yang kecil untuk golongan kecil dengan tujuan mereka bisa berwirausaha, kredit ini ditunjukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa, kredit ini digunakan untuk membantuk golongan kecil.

Segmen Korporasi adalah kredit yang pinjamannya ditentukan dengan melibatkan pihak calon peminjam suku bunga bisa dikompromi, bentuk dan jangka waktu bisa diatur, jaminan dan syarat lain juga begitu pokoknya calon debitur dimungkinkan untuk ikut menentukan skem kreditnya, biasanya orientasi kredit korporasi adalah golongan menengah dan besar kebanyakan yang berbentuk perusahaan. **Segmen CKPN** (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) merupakan dana cadangan khusus yang dibentuk pihak perbankan untuk menanggulangi risiko kredit yang tidak dapat ditagih kembali. Pembentukan dana CKPN berdasarkan dari penilaian kredit yang dilakukan pihak perbankan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pinjaman dalam bentuk ritel dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebesar Rp.601.468.900 dengan tingkat peresentase dari tahun 2015 ke 2014 sebesar 9,99%, pinjaman dalam bentuk

mikro selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 494.749.101 dengan tingkat persentase dari tahun 2015 ke 2014 sebesar 14,86%, dan pinjaman korporasi selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 397.676.491 dengan tingkat persentase dari tahun 2015 ke 2014 sebesar 19,09%, sedangkan pinjaman CKPN selama 3 tahun sebesar Rp.48.220.064 dengan tingkat persentase dari tahun 2015 ke 2014 sebesar 8,03.

Tabel 2
Perkembangan *Nonperforming Loan*
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015
Total kredit yang diberikan	448.344.856	510.696.841	581.094.544
Total kredit <i>performing</i>	441.045.021	510.617.269	568.910.408
Total kredit <i>non performing</i>	7.299.835	9.079.572	12.184.136
<i>Nonperforming Loan (gross)</i>	1,63%	1,78%	2,10%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa persentase *Nonperforming Loan* setiap tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2013 persentase sebesar 1,63 % diperoleh dari total kredit *Nonperforming Loan* / total kredit yaitu : $(7.299.835 : 448.344.856) \times 100 \%$. Tahun 2014 sebesar 1,78 % diperoleh dari total kredit *Nonperforming Loan* / total kredit yaitu : $(9.079.572 : 510.696.841) \times 100 \%$. Sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 2,10 % diperoleh dari total kredit *nonperforming* / total kredit yaitu : $(12.184.136 : 581.094.544) \times 100 \%$, itu di karena kan semakin meningkat pemberian kredit maka akan semakin meningkat pula resiko terjadinya NPL (*nonperforming loan*).

Dari sisi nominal, *Nonperforming Loan* BRI mengalami kenaikan sebesar 34,2% dibandingkan tahun 2014 dan Rasio *Nonperforming Loan* naik dari 1,78% menjadi 2,10% di tahun 2015 atau naik 320 bps. Namun demikian *Nonperforming Loan Coverage Ratio* masih terjaga di 151,15%, sehingga rasio kredit bermasalah masih terjaga ditingkat risiko yang masih dapat ditolerir. Pencapaian rasio *Nonperforming Loan* tersebut tidak terlepas dari upaya manajemen dalam menjaga kualitas kredit melalui program *The Lower The Better* yang dimulai pada awal triwulan 3 2015.

1. Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kategori kredit pada Bank Rakyat Indonesia berdasarkan tunggakan angsurannya dibagi atas 5 golongan. Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga, Golongan II Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Golongan III kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet yang Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

Kredit bermasalah atau *Nonperforming Loan* diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Golongan III dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Golongan I dan II merupakan *Performing Loan*. Apabila terjadi perubahan kualitas suatu kredit atau perubahan golongan kredit yang diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran bunga dan pokok yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Perubahan tersebut dalam pemberian kredit disebut dengan perubahan kolektibilitas kredit.

Tabel 3:

**Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk**

Golongan	Lama tunggakan Angsuran	Kategori
Golongan I	0 hari	Lancar
Golongan II	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
Golongan III	91-180 hari	Kurang lancar
Golongan IV	181-270 hari	Diragukan
Golongan V	Lebih 270 hari	Macet

Sumber :Hasil Olahan Penulis

2. Pengukuran Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Sebelum 1 Januari 2010, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Menggunakan dasar pengukuran kredit bermasalah dengan konsep *historical cost*, dimana asset dicatat sebesar pengeluaran kas (*cash basis*) yang dibayar atau sebesar nilai wajar yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh setor pada saat perolehan.

Penurunan nilai atas kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi kemudian jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat asset dengan nilai kiniestimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan awal. Nilai asset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Akan tetapi *cash basis* tidak dihilangkan pada PSAK Nomor 55 (revisi 2011) melainkan *cash basis* disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian ataupun inflasi tetap dapat diperhitungkan. Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tersebut telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan paragraf 70.

3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Tabel 4
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Berdasarkan PSAK 31 dan PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia).

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
1. Pengakuan dan pengukuran	<p>1. Kredit <i>performing</i></p> <p>a) Kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit.</p> <p>b) Penyisihan kredit dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang didominasi yang diberikan</p> <p>c) Pendapatan bunga diakui secara akrual</p>	<p>1. Kredit <i>performing</i></p> <p>a) Bank melakukan perhitungandan pembebanan bunga kredit sesuai dengan perjanjian dengan debitur dan mengakui kredit <i>performing</i> diakui secara akrual.</p> <p>b) Apabila diterima setoran dari debitur untuk kredit dengan kualitas lancar, apabila dalam perhatian khusus dan kurang lancar, maka urutan penyelesaian kewajiban</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	<p>2. kredit <i>nonperforming</i></p> <p>a) Pendapatan bunga dari kredit dan asset produktif lain yang <i>nonperforming</i> diakui pada saat pendapatan tersebut diterima</p> <p>b) Pada saat diklasifikasikan sebagai <i>nonperforming</i> bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan.</p> <p>c) Apabila dilakukan pembatalan atas bunga yang</p>	<p>debitur kepada bank diprioritaskan untuk:</p> <p>a. Biaya lain-lain</p> <p>b. Membayar tunggakan bunga</p> <p>c. Jika masih ada sisa untuk membayar pokok kredit</p> <p>2. Kredit <i>nonperforming</i></p> <p>a) Kredit <i>nonperforming</i> diakui secara kas, artinya bank tidak boleh mengakui sebagai pendapatan sebelum menerima pembayaran secara tunai dari debitur. Bunga kredit <i>nonperforming</i> diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian)</p> <p>b) Untuk kredit diragukan dan macet setoran yang diterima</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	<p>telah diakui tetapi bunga tersebut belum tertagih, pembtalan tersebut akan mengurangi pendapatan bunga yang telah diakui.</p> <p>d) Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit yang diragukan dan macet diakui terlebih dahulu pengurang pokok kredit kelebihan penerimaan dan pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.</p> <p>a) Untuk kredit yang <i>nonperforming</i> yang digolongkan diragukan dan macet penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok</p>	<p>Bank. didahulukan untuk menyelesaikan pokok kredit dan sisanya untuk membayar tagihan bunga. Perlakuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kredit tersebut sangat sulit untuk dapat ditagih / diterima seluruhnya.</p> <p>c) Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai <i>nonperforming</i> bank harus membatalkan bunga kredit yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar oleh debitur. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	kemungkinan ketertagihannya sangat rendah.	<p>(pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).</p> <p>d) Jika perubahan kualitas kredit tersebut terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal selesai dilakukan maka pembatalan bunga tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal neraca (<i>subsequent event</i>) sebagai koreksi saldo laba.</p> <p>Jika perubahan kredit terjadi setelah tanggal neraca dan pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal selesai dilakukan maka pembatalan bunga tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	<p>3. Pengambilan agunan yang diserahkan debitur</p> <p>a) Agunan yang diambil diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.</p> <p>b) Nilai bersih yang dapat <i>direalisasi</i> adalah nilai wajar yang dikurangi estimasi biaya pelepasan.</p> <p>c) Selisih antara nilai agunan yang telah diambil ahli dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.</p> <p>d) Penerimaan kredit yang telah</p>	<p>dan diakui sebagai koreksi dalam laporan laba rugi berjalan.</p> <p>3. Pengambilan agunan yang diserahkan debitur</p> <p>a) Agunan yang diambil diakui sebagai nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi <i>estimasi</i> biaya pelepasan, apa bila terdapat nilai permanen dari agunan yang diambil ahli maka agunan tersebut wajib disesuaikan.</p> <p>b) Apabila telah ada kesepakatan antara bank debitur bahwa agunan digunakan untuk penyesuaian seluruh</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
2. Penyajian	<p>dihapus bukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian kredit sebesar nilai pokok. Jika penerimaan tersebut melebihi nilai pokonya diakui sebagai pendapatan bunga.</p> <p>1. Neraca dan laporan laba rugi</p> <p>a) Bank menyajikan asset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristik yang disusun berdasarkan urutan ekuilidasinya.</p>	<p>kewajiban debitur, dan nilai agunan yang diambil ahli lebih kecil dari pada kewajiban debitur, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan kerugian kredit.</p> <p>c) Apa bila nilai agunan yang diambil ahli lebih besar dari ada kewajiban debitur maka agunan yang diambil ahli tersebut diakui maksimum sebesar kewajiban yang disepakati untuk disesuaikan.</p> <p>1. Kredit <i>performing</i></p> <p>a) Disajikan dineraca sebesar pokok kredit.</p> <p>b) Bunga kredit <i>performing</i> yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	<p>b) Kredit disajikan pada neraca</p> <p>c) Penyisihan kerugian asset yang dibentuk dan disajikan sebagai pos pengurangan (<i>offsetting account</i>) laba rugi (kredit <i>performing</i>).</p> <p>d) Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteriknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (<i>multiple step</i>) yang menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.</p>	<p>diterima pembayarannya disajikan sebagai tagihan bunga kredit <i>performing</i> (pendapatan bunga kredit yang masih belum diterima).</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
	<p>e) Jenis-jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank antara lain pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provinsi, serta pendapatan jasa lainnya.</p> <p>2. Penyajian bunga kredit <i>nonperforming</i></p> <p>a. <i>Komitmen, kontijensi</i> dan unsur-unsur diluar neraca (<i>balance sheet items</i>.</p> <p>a) kontijensi berhubungan dengan : Pendapatan bunga dalam penyesuaian yang merupakan perhitungan bunga dari asset produktif <i>nonperforming</i> yang belum dapat diakui sebagai</p>	<p>2. Kredit <i>nonperforming</i></p> <p>Bunga kredit <i>nonperforming</i> (bermasalah) diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK 31	PAPI
3. Pengungkapan	<p>pendapatan bunga dalam periode berjalan.</p> <p>1. Bank harus mengungkapkan hal-hal berikut tentang perkreditan:</p> <p>a). Jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah kredit masing-masing.</p> <p>b). Jumlah kredit yang diberikan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.</p> <p>c). Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.</p>	<p>1. Hal-hal yang harus diungkapka:</p> <p>a). Jenis kredit, sektor ekonomi dan jumlah kredit masing-masing.</p> <p>b). Jumlah kredit yang diberikan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa</p> <p>c). Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.</p> <p>d) jumlah kredit yang dijanjikan oleh pihak lain seharusnya resiko yang</p>

Sumber :Hasil Olahan Penulis

B. Perlakuan Akuntansi *Nonperforming Loan* Kesesuaiannya Dengan PSAK Pada Bank Rakyat Indonesia

1. Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK no 31 dilihat dari :
 - a. Kredit performing dinyatakan sudah sesuai dilihat dari pendapatan bunga yang diakui secara akrual.
 - b. Kredit *nonperforming* dinyatakan telah sesuai dilihat dari ketika kredit klasifikasikan sebagai *nonperforming* bank harus membatalkan bunga kredit yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum di bayar oleh debitur.
 - c. Pengambilan agunan yang diserahkan debitur dinyatakan telah sesuai dilihat dari agunan yang diambil diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.
2. Penyajian terhadap yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK no 31 dilihat dari penyajian laporan keuangannya, seperti neraca, labarugi, laporan arus kas. (lampiran)
3. Pengungkapan yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK no 31 dilihat dari pengungkapan jumlah kredit yang diberikan dan kedudukan bank dalam pembiayaan. (lampiran)

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas Nampak bahwa penerapan PSAK no 31 telah sesuai hanya saja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini disebabkan karena *human error* dimana terdapat kemungkinan

salah memasukan data, baik nilai plafon kreditnya, pengklasifikasian kredit, besarnya bunga, atau jangka waktunya. Dari kesalahan memasukkan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian dan pengungkapan. Dan diketahui Bank telah melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kesalahan yang dapat terjadi akibat *human error* yaitu salah satunya mengotorisasi setiap persetujuan yang diberikan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh kepala cabang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk kredit bermasalah (*Nonperforming loan*) telah sesuai dengan PSAK dimana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, namun disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian ataupun inflasi tetap dapat diperhitungkan. Perlakuan akuntansi dalam hal Penyisihan kerugian penurunan nilai yang telah dilakukan bank baik dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan terhadap pendapatan dari kredit bermasalah telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK No.31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Bank telah menggunakan sistem komputer dalam aktivitasnya khususnya secara akuntansi sehingga untuk keseluruhan perlakuan akuntansi akan sama secara keseluruhan (pusat maupun cabang) karena telah disusun sesuai PSAK dan PAPI yang berlaku serta selalu diperbaharui sistemnya, namun seringkali yang menjadi masalah adalah *human error* dimana terdapat kemungkinan salah memasukan data, baik nilai plafon kreditnya, pengklasifikasian kredit, besarnya bunga, atau jangka waktunya. Dari kesalahan memasukkan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, definisi pos, dan juga penyajian dan pengungkapan. Dan diketahui bank telah melakukan beberapa tindakan untuk

mengurangi kesalahan yang dapat terjadi akibat *human error* yaitu salah satunya mengotorisasi setiap persetujuan yang diberikan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh kepala cabang.

B. Saran

Saran dari penulis yaitu secara keseluruhan sistem kerja Bank Rakyat Indonesia terhadap Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* sudah sesuai dengan PSAK no 31 tentang perbankan hanya yang menjadi kendala saat ini atau masalah yaitu *human error* dimana *human error* itu sendiri adalah kegagalan dari manusia untuk melakukan tugas yang telah didesain dalam batas ketepatan, rangkaian, atau waktu tertentu.

Sebaiknya pihak Bank Rakyat Indonesia lebih memperhatikan sistem *Human Error* agar tidak terjadi kesalahan atau meningkatnya Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* dan cara untuk mengatasi *human error* yaitu :

1. Memahami kesalahan pada pekerjaan
2. Memperhatikan sistem kerja
3. Bentuklah suasana yang nyaman terhadap pekerjaan
4. Memberikan pelatihan
5. Memberikan motivasi

Oleh karena itu sebaiknya pihak Bank memperhatikan solusi atau cara mengatasinya agar tidak terjadi lagi kesalahan terhadap *human error* dan terjadinya penurunan terhadap kredit bermasalah *nonperforming loan* pada PSAK no. 31 tentang perbankan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahmud, 2006 . Manajemen Risiko Strategi perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminullah, Jagatsyah. 2007. Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Sesuai PSAK No. 31 Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di *Unit Regional Credit Recovery Makassar*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Andi Jayanti. 2012. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Ayu, Nitasari. 2015. Kasus Kredit Macet BRI cabang jambi 2010. Jambi ayuntsr.blogspot.com.2015/04
- Bastian, Indra, Suharjono, 2006. Akuntansi Perbankan . Buku Satu. Edisi Pertama Salemba Empat Jakarta.
- Belkoui, Ahmed Riahi 2000. Teori Akuntansi edisi Pertama Sulemba Empat Jakarta.
- Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 2008. Buku Laporan Tahunan (anunual report) Makassar.
- Darsono Ashari 2005 Pedoman praktis memahami laporan keuangan. Edisi pertama Andi offset, Yogyakarta.
- Dendrawijaya, Lukman 2005. Manajemen Perbankan Edisi kedua Ghaliah Indonesia. Bogor.
- Faud, Ramly, M Rustam DM. 2005. Akuntansi Perbankan Petunjuk Praktis Operasional Bank. Edisi Pertama, Graha Ilmu.
- Firdaus, Rahmat, Maya Ariayanti, 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori Masalah Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Cetakan Kedua Alfabeta, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri, 2014. Ekonomi Islam edisi Satu Bumi Aksara, Jakarta.

- , 2004. Akuntansi Aktiva Tetap. Edisi Tiga, Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Harahap, Sofyan Syahri, 2008. Teori Akuntansi Edisi revisi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hasibuan Melayu SP, 2006. Dasar-dasar perbankan. Cetakan PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2007 Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007, Salemba Empat Jakarta.
- Kasmir, 2006 Dasar-dasar Perbankan Edisi Pertama. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Kasmir, 2008 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi-8- PT. Grafindo Persada Jakarta.
- Pembinaan Nasabah dan Pengelolaan Kredit Bermasalah. 2011. Pelatihan Pembekalan Mantri BRI, Makassar
- Pembinaan Nasabah dan Pengelolaan Kredit Bermasalah. 2013. Pelatihan Pembekalan Mantri BRI, Makassar
- Soemarso, 2004 Akuntansi Sebagai Pengantar. Edisi Kelima. Salemba Empat Jakarta. Undang-undang No.10/ 1998 2002. Sinar Grafika Jakarta. www.bi.go.id
- Http : // [auditme-post.blogspot.com/2008/09/pengakuan dan pengukuran unsur-unsur-laporan-keuangan.html](http://auditme-post.blogspot.com/2008/09/pengakuan-dan-pengukuran-unsur-unsur-laporan-keuangan.html). tanggal 12/03/2016.
- <http://bri.co.id/corporate>. tanggal 24/04/2016
- <http://bri.co.id/report/pkbl>. tanggal 09/05/2016

LAMPIRAN

Tinjauan Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Ringkasan Neraca	Tabel Komposisi Aset			dalam Rp. Juta		
	2013	2014	2015	Growth (%)		2014/2013
				2013/2012	2014/2013	
Kas	19.171.778	22.469.167	28.771.635	17,20		28,05
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	51.184.429	61.717.798	25,70		20,58
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	45.742.003	72.615.882	58.570.756	58,75		(19,34)
Surat berharga yang dimiliki - Netto	66.039.800	133.700.040	132.999.555	102,45		(0,52)
Obligasi Rekapitulasi Pemerintah	4.511.419	4.303.596	3.815.958	(4,61)		(11,33)
Kredit yang diberikan	448.344.856	510.696.841	581.094.544	13,91		13,78
CKPN Kredit -	(15.418.096)	(16.162.795)	(17.514.435)	4,83		8,36
Penyertaan - Netto	222.851	251.573	269.130	12,89		6,98
Aset Tetap - Netto	3.972.612	5.917.470	8.039.280	48,96		35,88
Tagihan Derivatif - Netto	4.981	536	-	(89,24)		(100)
Tagihan Akseptasi - Netto	3.679.684	6.525.688	5.163.471	77,34		(20,87)
Aset Pajak Tangguhan	2.188.506	1.688.872	1.983.774	(22,83)		17,46
Aset Lain	7.004.037	8.792.891	13.514.846	25,54		53,70
Total Aset	626.182.926	801.984.190	878.426.312	28,09		9,53

Pada tahun 2015, aset BRI meningkat 9,5% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp801,98 triliun menjadi Rp878,43 triliun yang disertai dengan peningkatan Dana Berbiaya sebesar 8,5%.

KOMPOSISI ASET

Peningkatan aset terutama didorong oleh peningkatan outstanding pinjaman sebesar Rp510,70 triliun dibandingkan tahun 2014 menjadi Rp581,09 triliun. Dengan pertumbuhan tersebut, maka komposisi Kredit terhadap Gross Aktiva Produktif naik dari 70,1% menjadi 74,3%.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas aset, sehingga selain didukung oleh Dana Berbiaya sebesar Rp57,8 triliun, kenaikan outstanding pinjaman sebesar Rp70,4 triliun juga bersumber dari realokasi dari Aset Produktif non-Pinjaman.

KREDIT YANG DIBERIKAN

Selama tahun 2015, BRI membukukan peningkatan outstanding kredit sebesar Rp70,40 triliun atau pertumbuhan tahunan sebesar 13,8%. Pertumbuhan Kredit tersebut mayoritas terjadi di segmen Mikro sebesar Rp24,37 triliun dan Korporasi sebesar Rp25,05 triliun, seiring dengan komitmen BRI dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil, serta memaksimalkan potensi pada bisnis yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Meskipun pinjaman segmen Korporasi tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhan tahunan sebesar 19,09%. Portofolio pinjaman BRI tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2014. Total proporsi outstanding pinjaman segmen Korporasi dan BUMN secara total masih dikisaran 27,7%

sehingga tidak terjadi penurunan produktifitas kredit selama tahun 2015, selain itu komposisi portofolio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman masih terjaga dikisaran 72,32%

Keuangan

Tabel Kredit yang Diberikan - Menurut Mata Uang

Segmen	dalam Rp Juta			Growth (%)	
	2013	2014	2015	2013-2014	2014-2015
	142.266.742	164.054.180	188.428.179	15,31	14,86
	142.266.742	164.054.180	188.428.179	15,31	14,86
	181.854.338	199.828.590	219.785.772	9,88	9,99
	171.286.336	190.408.020	212.380.275	11,16	11,54
	10.568.002	9.420.570	7.405.497	(10,86)	(21,39)
	110.195.386	131.214.518	156.266.587	19,07	19,09
	72.495.929	85.636.668	105.359.977	18,13	23,03
	37.699.457	45.577.850	50.906.610	20,90	11,69
Kredit Non Pembiayaan Piutang Syariah	434.316.466	495.097.288	564.480.538	13,99	14,01
	386.049.007	440.098.868	506.168.431	14,00	15,01
	48.267.459	54.998.420	58.312.107	13,95	6,03
Pembiayaan dan Piutang lain-lain	14.028.390	15.599.553	16.614.006	11,20	6,50
Kredit yang Diberikan	448.344.856	510.696.841	581.094.544	13,91	13,78

KREDIT BERDASARKAN SEGMENT

	2013	2014	2015	Growth (%) 2014-2015
	181.854.338	199.828.590	219.785.772	9,99
	142.266.742	164.054.180	188.428.179	14,86
Prasi	110.195.386	131.214.518	156.266.587	19,09
an Kredit	434.316.466	495.097.288	564.480.538	14,01
	(15.171.736)	(15.886.145)	(17.162.183)	8,03
an Kredit setelah dikurangi	419.144.730	479.211.143	547.318.355	14,21

KREDIT BERDASARKAN JENIS

	2013	2014	2015	Growth (%) 2014-2015
des	132.131.803	152.905.930	178.759.239	16,91
Kerja	146.719.136	166.174.398	181.546.071	9,25
umasi	74.649.615	82.118.614	89.621.859	9,14
asi	49.859.161	66.629.483	88.058.790	32,16
am	10.594.551	7.259.617	7.064.037	(2,69)
asi	20.308.116	19.958.889	19.384.044	(2,88)
an kunci	54.084	50.357	46.498	(7,66)
an Kredit	434.316.466	495.097.288	564.480.538	14,01
	(15.171.736)	(15.886.145)	(17.162.183)	8,03
an Kredit setelah dikurangi	419.144.730	479.211.143	547.318.355	14,21

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

LIABILITAS

Tabel Komponen Liabilitas						
Ringkasan Neraca				dalam Rp Juta		
	2013	2014	2015	Growth (%)		
				2013-2014	2014-2015	
Simpanan Nasabah	504.281.382	622.321.846	666.995.379	23,41	7,50	
Giro	79.336.951	90.052.180	114.367.088	13,51	27,00	
Tabungan	212.996.625	236.394.994	272.470.992	10,99	15,26	
Deposito	211.947.806	295.874.672	282.157.299	39,60	(4,64)	
Liabilitas Segera	5.065.527	7.043.772	5.138.562	39,05	(27,05)	
Simpanan dari bank lain	3.691.220	8.655.392	11.165.073	134,49	29,00	
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	15.456.701	11.377.958	-	(26,39)	
Pinjaman diterima	9.084.913	24.986.862	35.480.358	175,04	42,00	
Pinjaman Subordinasi	2.097.024	77.582	56.468	(96,30)	(27,22)	
Liabilitas Lainnya	22.306.261	25.736.201	33.085.335	15,38	28,55	
Total Liabilitas	546.526.327	704.278.356	765.299.133	28,86	8,66	

Pada tahun 2015, total Liabilitas BRI mencapai Rp765,30 triliun atau meningkat Rp61,02 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,66% dibandingkan tahun 2014. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan pertumbuhan Aset, peningkatan Liabilitas terutama didorong oleh kenaikan Simpanan Nasabah atau Dana Pihak Ketiga sebesar Rp46,67 triliun.

Komposisi Liabilitas

Sebagai bank dengan jumlah jaringan kerja yang terbesar dan tersebar di Indonesia, struktur liabilitas BRI didominasi oleh Dana Pihak Ketiga seperti terlihat pada rincian table dibawah ini:

Struktur Liabilitas (%)	2013	2014	2015
Dana Pihak Ketiga	92,27	88,36	87,42
Liabilitas segera	0,93	1,00	0,67
Simpanan dari Bank Lain	0,68	1,23	1,46
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	2,19	1,49
Pinjaman diterima	1,66	3,55	4,64
Pinjaman Subordinasi	0,38	0,01	0,01
Liabilitas Lainnya	4,08	3,65	4,32
Total Liabilitas	100	100	100

Dana Pihak Ketiga

Pada tahun 2015, Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun BRI tercatat sebesar Rp669 triliun. Jumlah ini meningkat Rp46,67 triliun atau tumbuh 7,50% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp622,32 triliun. Hal menggembirakan pada tahun 2015 adalah pertumbuhan Dana Murah diatas pertumbuhan total Dana Pihak Ketiga yang mencapai 18,5%.

Pertumbuhan dana murah tersebut bersumber dari Giro dan Tabungan dengan kenaikan masing-masing Rp24.31 triliun dan Rp36,08 triliun selama tahun 2015, sehingga komposisi Dana Murah meningkat dari 52,46% ke 57,82%. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan dalam menurunkan Beban Bunga dalam menjaga tingkat profitabilitas bank sehingga Rasio Biaya Dana turun dari 52,46% di tahun 2014 ke 57,82% di tahun 2015.

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

Liabilitas Lainnya

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, surat berharga yang diterbitkan, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, dan liabilitas lain-lain. Pada tahun 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap 1 dengan nilai Rp2,99 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp5.321 pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2015, nilai liabilitas lainnya naik 60,80% dari Rp15,56 triliun di tahun 2014 menjadi 25,02 triliun.

EKUITAS

Komponen	Tabel Ekuitas			dalam Rp Juta	
	2013	2014	2015	Growth (%)	
				2013-2014	2014-2015
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	-	-
Tambahan Modal disetor - bersih	2.773.858	2.773.858	2.773.858	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	82.083	56.468	49.069	(31,21)	(13)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	(727.644)	(198.888)	(1.145.471)	(72,67)	475,94
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti-neto	375.345	124.147	541.468	(66,92)	336,15
Modal Saham diperoleh kembali (Saham Treasury)	-	-	(2.286.375)	-	100
Total saldo laba	70.740.908	88.607.774	106.733.021	25,26	20,46
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	79.411.841	97.530.650	112.832.861	22,82	15,69
Kepentingan non pengendali	162.465	175.184	294.318	7,83	68,01
Total Ekuitas	79.574.306	97.705.834	113.127.179	22,79	15,78

Pada akhir tahun 2015, proporsi liabilitas dan ekuitas BRI untuk mendanai aset masing-masing sebesar 87,12% dan 12,88%. Total aset tumbuh 9,53%, sedangkan liabilitas mengalami pertumbuhan 8,66%, dan ekuitas tumbuh 15,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal masih menjadi sumber dana utama ekspansi bisnis BRI.

Pada tahun 2015, ekuitas meningkat sebesar Rp15,42 triliun atau tumbuh 15,8% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp97,71 triliun menjadi Rp113,13 triliun. Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp18,12 triliun atau 20,5% dibandingkan tahun 2014 menjadi Rp106,73 triliun sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2015 mengenai rasio pembayaran dividen (DPO) sebesar 30%.

Selain itu, pada pos Ekuitas juga terdapat pos baru berupa Saham Treasury (Treasury Stock) dari hasil eksekusi program *Share Buyback* yang telah dilakukan sepanjang Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Program ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Ikhtisar Saham. Saham Treasury tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) dengan persetujuan RUPST 2016.

KEGIATAN PENDANAAN

- 1. LARUTAN (100%) BUKU BUNGA
- 2. DANA DARI AKTIF ASSET
- 3. ASPEK NEGATIF (100%) BUKU BUNGA
- 4. AKTIF NEGATIF (100%) BUKU BUNGA
- 5. LARUTAN (100%) BUKU BUNGA

Keuangan

ARUS KAS

Arus Kas	Tabel Arus Kas		
	2013	2014	2015
Arus Kas dari Kegiatan Operasi	4.309.086	75.822.636	45.544.908
Arus Kas yang digunakan untuk Kegiatan Investasi	(9.144.971)	(24.649.614)	(56.704.539)
Arus Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari Kegiatan Pendanaan	(2.579.081)	9.504.849	1.804.324

Arus Kas dan setara kas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,4% atau Rp9,34 triliun dibandingkan dengan jumlah pada akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 yang sebesar Rp17,73 triliun menjadi Rp18,39 triliun. Penurunan tersebut terjadi pada pos Giro Berjangka yang ditempatkan pada bank lain yang konsisten dengan strategi konservatif untuk meningkatkan likuiditas aset dalam rangka menjaga Margin Bunga Bersih

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

Bahan arus kas dari kegiatan operasi menunjukkan bahwa operasional BRI masih dalam kondisi yang sehat dengan arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi dari Rp31,23 triliun tahun 2014 menjadi Rp38,97 triliun di tahun 2015. Pendapatan diterima dalam bentuk Kas mencapai Rp82,59 triliun yang diperoleh BRI dalam Laporan Rugi. Selain Pendapatan Operasi, investasi dan syariah, BRI juga menerima pendapatan dalam bentuk Kas yang berupa Pendapatan Recovery sebesar Rp3,35 triliun sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada pembahasan CKPN.

Posisi Kas Neto yang diperoleh dari Kegiatan Operasi menurun dari Rp75,82 triliun di tahun 2014 menjadi Rp45,54 triliun di tahun 2015. Aktivitas operasi yang paling dominan dalam mempengaruhi arus kas untuk kegiatan operasi adalah penurunan penghimpunan dana dari Deposito Berjangka sebesar Rp15,57 triliun. Hal ini sejalan dengan strategi BRI dalam meningkatkan rasio dana murah untuk menjaga profitabilitas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan Beban Bunga.

ARUS KAS UNTUK KEGIATAN INVESTASI

Jumlah kas yang digunakan untuk mendukung aktivitas investasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp56,70 triliun, naik 130,0% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp24,65 triliun. Sejalan dengan strategi untuk meningkatkan produktifitas aset, BRI membukukan kenaikan efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp53,44 triliun. Selain itu, BRI juga menggunakan kas untuk membeli aset tetap sebesar Rp3,28 triliun.

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN

Pada aktivitas pendanaan, selama tahun 2015 BRI membukukan pengeluaran kas sebesar Rp9,58 triliun. Jumlah tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembayaran deviden sebesar Rp7,27 triliun, pembelian kembali saham beredar (Treasury Stock) sebesar Rp2,29 triliun serta membayar pinjaman subordinasi sebesar Rp21,11 miliar.

Kendati demikian, pengeluaran kas juga dilindungi dengan kas masuk dari penerimaan pinjaman dan proceed atas surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp11,38 triliun.

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

RASIO KEUANGAN

Uraian	Tabel Rasio Keuangan*		
	2013	2014	dalam (%) 2015
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	16,99	18,31	20,59
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,06	1,09	1,33
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,28	1,26	1,57
NPL gross	2,90	2,40	2,37
NPL net	1,55	1,69	2,02
Return on Asset (ROA)	0,31	0,36	0,52
Return on Equity (ROE)	5,03	4,73	4,19
Net Interest Margin (NIM)	34,11	31,19	29,89
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	8,55	8,51	8,13
Capital Efficiency Ratio (CER)	60,58	65,42	67,96
Loan to Deposit (LDR)	42,13	43,14	43,81
Kepatuhan (Compliance)	88,54	81,68	86,88
1. a. Persentase pelanggaran BMPK			
i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
b. Persentase pelampauan BMPK			
i. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00
ii. Pihak tidak terkait	0,00	0,00	0,00
2. Giro Wajib Minimum (GWM)			
a. GWM Utama Rupiah	8,02	8,07	9,31
b. GWM Valuta Asing	8,00	8,00	8,43
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3,15	3,86	2,33

Rasio Keuangan secara umum akan dibagi dalam 3 pembahasan yaitu:

- Kemampuan membayar Kewajiban
- Rasio Produktifitas
- Rasio Efisiensi

KEMAMPUAN MEMBAYAR KEWAJIBAN

Dalam industri perbankan, kemampuan sebuah bank dalam membayar kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilihat dari perhitungan rasio Solvabilitas dan Kolektibilitas. Kedua kelompok rasio tersebut terdiri dari Rasio Likuiditas, Rasio Kolektibilitas, dan Rasio Kecukupan Modal.

Rasio Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR)
BRI merupakan salah satu bank dengan portofolio bisnis yang dominan pada fungsi intermediasi disektor riil. Selain terlihat dari proporsi Kredit yang mendominasi Aktiva Produktif, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan (LDR) BRI juga dijaga dilevel optimal yaitu 86,88%. Dibandingkan dengan tahun 2014, LDR di tahun 2015 sedikit meningkat. Hal ini sesuai dengan strategi BRI dalam meningkatkan tingkat produktifitas mengingat angka LDR tersebut masih berada dalam toleransi dari target internal yang ditetapkan antara 85% sampai dengan 92%.

Keuangan

Liquidity Ratio (LFR)
 Peraturan OJK No 42/POJK.03/2015, BRI wajib melaporkan rasio Pinjaman terhadap Pendaanaan, yang dimaksud adalah Simpanan Nasabah dan Surat Berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh non-Bank dan dapat diperjualbelikan. Tingkat LFR BRI di tahun 2015 mencapai 86,57%, angka tersebut dibawah LDR dikarenakan Surat Berharga yang diterbitkan BRI yang dimiliki oleh Pihak Ketiga non-Bank dan dapat diperjualbelikan, yang dimasukkan dalam perhitungan LFR adalah: Obligasi Pemerintah Republik Indonesia Berdenominasi USD senilai Rp6,85 triliun dan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap 1 sebesar Rp3 triliun

Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Tingkat Kolektibilitas

Non Performing Loan/NPL
 senantiasa menjaga kualitas aset kredit di level yang baik. Implementasi Manajemen Risiko dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan dan senantiasa dilakukan pemantauan. Hal ini terlihat dari NPL BRI secara total, tahun 2015 berada pada level yang terjaga baik yaitu 2,10%.

	PERKEMBANGAN NPL		
	2013	2014	2015
			dalam Rp. Juta
Kredit yang diberikan	448.344.856	510.696.841	581.094.544
Kredit Performing	441.045.021	510.617.269	568.910.408
Kredit Non Performing	7.299.835	9.079.572	12.184.136
(proposisi)	1,63%	1,78%	2,10%

Secara nominal, NPL BRI mengalami kenaikan sebesar 34,2% dibandingkan tahun 2014 dan Rasio NPL naik dari 1,63% menjadi 2,10% di tahun 2015 atau naik 320 bps. namun demikian NPL Coverage Ratio masih terjaga di 151,15%, sehingga rasio kredit bermasalah masih terjaga ditingkat risiko yang masih dapat ditolerir.

Keberhasilan rasio NPL tersebut tidak terlepas dari upaya manajemen dalam menjaga kualitas kredit melalui program **Lower The Better** yang dimulai pada awal triwulan 3 2015. Program ini dilakukan dengan menerjunkan 100 Unit Officer khusus di 100 Kantor Cabang dengan tingkat NPL terbesar diseluruh Indonesia.

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan, tim ini juga bertugas memberikan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir timbulnya risiko kredit, antara lain melalui:

- percepatan proses restrukturisasi Kredit.
- percepatan proses penyelesaian Kredit (Lelang Agunan, dll)

Untuk kesuksesan program tersebut, manajemen berencana untuk melanjutkannya di tahun 2016 dengan menambah jumlah Kantor Cabang yang lebih banyak.

NPL Coverage
 menggambarkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian yang timbul atas kredit bermasalah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, NPL Coverage Ratio terjaga di posisi 151,15% di tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa setiap Rupiah NPL dicadangkan sebesar Rp1.50.

RIWAYAT HIDUP



Eka Setiani Muslimah, dilahirkan di Sungguminasa pada tanggal 12 Mei 1994. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan almarhum Bakka dg. Tobo dengan ST. Sayana. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Tetebatu 1 pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Limbung Jurusan Akuntansi dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi.

Penulis menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2016 dengan menyusun skripsi yang berjudul “ Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah *Nonperforming Loan* Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No 31 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Makassar